

ABSTRAK

IRIENA INAYATIN, 2012. PENGARUH KOORDINASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS) (Studi Pelaksanaan P2WKSS Bidang Kesehatan di Desa Mekarharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar)

Hasil pengamatan peneliti dapat ditemukan beberapa permasalahan efektifitas pencapaian program terpadu Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Bidang Kesehatan di Desa Mekarharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar tahun belum tercapai secara optimal yang diduga disebabkan oleh pelaksanaan koordinasi oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan belum dilaksanakan dengan baik. Fokus penelitian ini diawali oleh rendahnya efektifitas program P2WKSS. Munculnya fenomena tersebut diduga kuat sebagai implikasi dari belum efektifnya koordinasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terhadap efektifitas Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kota Banjar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka *problem statement* dalam penelitian ini adalah “Efektivitas Program P2WKSS Bidang Kesehatan di Kota Banjar masih rendah”, dari pernyataan masalah di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut : Berapa besar pengaruh koordinasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terhadap efektifitas program P2WKSS di Kota Banjar. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode *Survey explanatory*, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh koordinasi terhadap efektifitas Program P2WKSS di Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut : 1) Pelaksanaan koordinasi telah dilaksanakan cukup baik dengan pegawai sehingga pegawai memahami tugas dan fungsinya dalam melaksanakan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar walaupun masih terdapat beberapa indikator yang masih harus ditingkatkan pelaksanaannya. 2) Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kota Banjar telah tercapai cukup efektif mengingat dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan pembagian kerja dengan cara membuat kelompok kerja yang diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian pekerjaan. 3) Terdapat pengaruh yang positif pelaksanaan koordinasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terhadap efektifitas program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kota Banjar artinya pelaksanaan koordinasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan memberikan dampak terhadap efektifitas program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kota Banjar apabila pelaksana melaksanakan koordinasi dengan baik.

**PENGARUH KOORDINASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TERHADAP EFEKTIVITAS
PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU
KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS)**

**(Studi Pelaksanaan P2WKSS Bidang Kesehatan di Desa Mekarharja
Kecamatan Purwaharja Kota Banjar)**

1.1.Latar Belakang Penelitian

Pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246) ,telah membawa pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Banjar “ Dengan Iman dan Takwa Kita Wujudkan Banjar Menuju Kota Agropolitan Termaju Di Priangan Timur Jawa Barat Tahun 2025” untuk mempercepat peningkatan akselerasi pembangunan, perlu adanya upaya yang berkesinambungan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Pembangunan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan manusia dan ini merupakan komitmen yang tersirat dan tersurat pada visi yang dituju, menempatkan manusia sebagai subjek dan sekaligus obyek pembangunan. Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, harus melalui upaya-upaya yang keras, cerdas, dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan dan pemberdayaan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Gambaran keprihatinan kondisi masyarakat perdesaan secara keseluruhan, juga menjadi cerminan bagi sejumlah desa yang ada di wilayah pemerintahan Kota Banjar, sebuah daerah otonom baru di Provinsi Jawa Barat. Kota Banjar sebelumnya merupakan bagian wilayah Kabupaten Ciamis, dan resmi menjadi daerah otonom kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa luas wilayah Kota banjar 113,9km², tersebar dalam 4 kecamatan dan 24 desa. Pemerintahannya sendiri, baru dapat dijalankan sepenuhnya setahun kemudian, tepatnya mulai tanggal 21 Februari 2003. Sebagai daerah otonom baru yang belum genap berusia lima tahun, sudah barang tentu pemerintah Kota Banjar masih harus menghadapi berbagai permasalahan. Hingga tahun 2012 ini tidak ada satu desapun yang berubah status menjadi kelurahan. Berarti, membicarakan masyarakat Kota Banjar, tidak lain membicarakan masyarakat perdesaan, yaitu komunitas masyarakat yang bercirikan dengan kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan.

Penamaan masyarakat miskin di Kota Banjar saat ini mengacu pada Program Keluarga Sejahtera sesuai Inpres Nomor 3 tahun 1996 yaitu dengan istilah “kurang sejahtera”, yaitu keluarga yang tergolong Prasejahtera dan Sejahtera I. Berdasarkan data dari Kantor Capilduk Kota Banjar sampai bulan Nopember 2011, diperlihatkan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Keluarga Golongan Prasejahtera dan Sejahtera I Kota Banjar
Bulan Nopember Tahun 2011

No	Kecamatan dan Desa	Hasil Pentahapan Keluarga Sejahtera							
		Keluarga Pra Sejahtera	Jumlah Jiwa	Keluarga Sejahtera I	Jumlah Jiwa	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III	Keluarga Sejahtera III Plus	Jumlah Jiwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Banjar	3.595	11.551	3.640	12.243	4.026	3.309	294	14.864
	Banjar	642	2.184	1.358	4.787	1.152	924	27	4.103
	Mekarsari	1.266	4.370	763	2.681	1.367	795	241	4.432
	Balokang	603	1.953	551	1.978	496	690	14	2.354
	Cibeureum	147	379	160	443	198	172	6	683
	Jajawar	238	694	149	451	160	158	2	707
	Neglasari	410	1.185	340	947	381	310	-	1.441
	Situbatu	289	786	319	956	272	260	4	1.144
2.	Pataruman	5.005	16.510	2.716	10.311	2.674	5.647	147	16.189
	Pataruman	1.299	4.731	668	2.337	552	1.358	17	3.894
	Hegarsari	769	2.446	842	3.938	1.056	1.449	110	4.226
	Mulyasari	824	2.609	383	1.355	190	1.322	-	2.719
	Batulawang	382	1.228	159	506	199	422	5	1.167
	Karyamukti	740	2.410	273	790	285	560	2	1.860
	Binangun	625	1.897	176	547	151	420	2	1.374
	Sukamukti	366	1.189	215	838	241	116	11	949
3.	Langensari	3.095	10.899	2.512	8.728	3.822	4.329	168	13.926
	Rejasari	796	2.731	696	2.397	424	587	43	2.546
	Kujangsari	892	3.005	486	1.734	655	908	50	2.991
	Bojongkantong	322	1.202	254	512	803	1.033	36	2.448
	Langensari	347	1.224	286	1.132	830	694	12	2.169
	Waringinsari	360	1.286	595	2.205	705	428	20	2.108
	Muktisari	378	1.451	195	748	405	679	7	1.664
4.	Purwaharja	1.231	4.089	884	3.031	1.440	2.272	79	5.906
	Purwaharja	318	1.016	218	719	603	1.071	3	2.213
	Karangpanimbal	290	1.055	295	1.104	212	338	23	1.158
	Raharja	261	852	209	678	333	424	32	1.259
	Mekarharja	362	1.166	162	530	292	439	21	1.276
	TOTAL	12.926	43.049	9.752	34.313	11.962	15.557	688	50.885

Sumber : Capilduk Kota Banjar Tahun 2012

Data yang dikeluarkan Capilduk tersebut di atas nampak bahwa masyarakat miskin di Kota Banjar sebanyak 22.678 keluarga (merupakan jumlah dari keluarga prasejahtera dan sejahtera I) dengan jumlah jiwa sebanyak 77.362. Dengan membandingkan terhadap jumlah penduduk Kota Banjar hingga Nopember 2011 yang jumlahnya 168.356 jiwa, maka penduduk miskin Kota Banjar mencapai 45,95 %.

Berdasarkan hasil survey Sosial Ekonomi Daerah Tahun 2011, Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Kegiatan Utama seminggu yang Lalu, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Kegiatan Utama Tahun 2007

No	Pendidikan Yang Ditamatkan	Kegiatan Utama							Jumlah
		Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				
		Bekerja	Mencari Pekerjaan*)	Jumlah	Sekolah	Mengurus RMT	Lainnya	Jumlah	
		N	N	N	N	N	N	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tdk/Blm Pernah Sklh	1.067	108	1.175	-	1.072	1.171	2.243	3.418
2	Tdk/Blm Tamat SD	8.428	1.649	10.077	8.428	7.811	2.786	19.025	29.102
3	SD/MI/Sdrjt	25.309	4.498	29.807	7.982	18.741	2.619	29.342	59.149
4	SLTP/Sdrjt	8.347	2.692	11.039	5.026	6.079	1.157	12.262	23.301
5	SLTA/Sdrjt	6.423	1.365	7.788	531	3.524	898	4.953	12.741
6	SMK	4.239	1.424	5.663	239	1.764	196	2.199	7.862
7	D.I/D.II	820	59	879	14	201	66	281	1.160
8	D.III/Sarmud	857	233	1.090	31	159	104	294	1.384
9	S.I/Univ. Keatas	2.036	321	2.357	-	160	229	389	2.746
Kota Banjar		57.526	12.349	69.875	22.251	39.511	9.226	70.988	140.863

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Banjar 2011*

Memperhatikan data Capilduk dan data yang ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik tersebut, sudah semestinya pemerintah Kota Banjar bersikap proaktif menanggulangi kemiskinan. Sikap tersebut diantaranya dapat meluncurkan program-program yang sesuai dengan karakteristik penduduk Kota Banjar yang langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan kemiskinan. Selama ini pengelolaan program penanggulangan kemiskinan secara langsung ditangani oleh pemerintah pusat. Semua sumber dananya berasal dari APBN atau sumber-sumber lain yang dapat dikelola oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang mulai berlaku sejak Januari 2001, upaya pengentasan kemiskinan tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam kewenangan ekonomi yang dipunyai daerah melekat pula kewenangan dan tanggung jawab untuk secara aktif dan secara langsung mengupayakan penanggulangan kemiskinan. Berbagai satrategi, kebijakan, dan program penanggulangan kemiskinan yang sudah dirancang oleh pemerintah daerah pada akhirnya tergantung pada ketersediaan dan mekanisme penggunaan anggaran yang dipunyai oleh daerah. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh kebijakan anggaran yang menunjukkan kepemihakan kepada orang miskin. Tanpa adanya kebijakan demikian dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan akan terhenti pada tataran wacana, dan sekedar retroika. Walau diakui sangatlah sulit untuk mengentaskan kemiskinan hingga mencapai 100%, akan tetapi setidaknya angka kemiskinan di Kota Banjar itu bisa dikurangi.

Hal tersebut sejalan dengan Misi Kota Banjar dari program akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat pada unit paling kecil, yaitu keluarga, serta lingkungan sosial yang paling intens, yakni desa/kelurahan, melalui gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, maka dalam mewujudkan harus dimulai dari upaya mensejahterakan keluarga. Peran perempuan dalam pembangunan adalah telah jelas mengamanatkan kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mewujudkan keluarga sejahtera dan membina generasi muda.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Program ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia termasuk termasuk perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan kedudukan, peran, kemampuan, kemandirian serta ketahanan mental spiritual perempuan melalui kegiatan lintas bidang dalam rangka pembangunan masyarakat perdesaan dan perkotaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota, mengamanatkan bahwa program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, terutama terkait dengan pelaksanaan pelayanan dasar.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah menyusun dan menerbitkan 4 (empat) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam bentuk pedoman pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, yang meliputi: (i) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; (ii) Perlindungan Perempuan; (iii) Perlindungan Anak; dan (IV) Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Program terpadu P2WKSS adalah Program peningkatan peranan perempuan yang mempergunakan pola pendekatan lintas sektor terkait yang terbentuk dalam suatu tim Pembina Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dengan leading sektor adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dan Anggotanya adalah : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kesbang dan Linmas Kantor Kementerian Agama, Kantor Satpol PP, Bagian Kesos, Bagian Ekonomi, Bagian Hukum dan Bagian Tapem. Tim tersebut terdiri dari lima kelompok kerja yaitu: Pokja I membidangi pendidikan, Pokja II membidangi kesehatan masyarakat, Pokja III membidangi ekonomi masyarakat, Pokja IV membidangi ketentraman dan ketertiban, Pokja V membidangi pemerintahan desa, dimana masing-masing kelompok kerja mempunyai tugas dan fungsi yang sudah ditentukan, serta terkoordinasi dengan upaya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas, yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota Banjar Nomor 147.44/Kpts.27-BKPSKBPP/2009 tentang Tim Pembina Program Terpadu

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Pada Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Sebagai Lokasi Kelurahan Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kota Banjar Tahun 2010.

Sasaran Program terpadu P2WKSS adalah wanita yang berusia 15-60 tahun dengan tingkat kesejahteraan tergolong rendah dari atau yang masuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I, menurut hasil pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN.

Jangkauan Program terpadu P2WKSS meliputi ; desa/kelurahan rawan sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan, atas usulan Bupati/Walikota ditetapkan oleh Gubernur dan Desa/Kelurahan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, berdasarkan atas asas kemandirian atau keswadayaan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, pelaksana program P2WKSS dituntut untuk selalu dinamis dalam merespon berbagai perubahan dan tuntutan. Efektif dan efisien pelaksanaan tugas akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan tim tersebut dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Badan Kependudukan Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Perempuan sebagai leading sektor dituntut untuk selalu proaktif dalam mengkoordinasikan OPD terkait dalam pelaksanaan dan keberhasilan program tersebut.

Koordinasi sebagaimana umumnya yang terjadi dilingkungan pemerintahan merupakan salah satu permasalahan yang terpenting karena koordinasi dirasakan mudah untuk diucapkan dan sukar untuk dilaksanakan dalam pengimplementasian di lapangan. Sehingga proses penyusunan rencana kerja sangatlah memerlukan adanya suatu koordinasi yang cukup intensif. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sinkronisasi antara perencanaan dan unsure-unsur lainnya dalam pengambilan kebijakan.

Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan disegala bidang senantiasa memerlukan kepentingan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terkonsentrasi pada upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan efektif, dalam rangka keberhasilan untuk mewujudkan suatu lembaga pemerintahan yang berwibawa, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme akan menjadi nyata dengan didasarkan pada upaya mengefektifkan koordinasi internal maupun koordinasi eksternal.

Terkait dengan pelaksanaan Program P2WKSS, koordinasi adalah merupakan hal yang penting dan mendasar dalam sebuah tim, karena koordinasi memberikan kontribusi yang jelas dan terarah bagi Tim pelaksana program P2WKSS dalam menjalankan suatu proses pelaksanaan tugas yang terarah dan jelas. Dalam tatanan proses kerja dalam suatu organisasi atau kelompok, biasanya sangat membutuhkan upaya koordinasi dimana proses kerja dan mekanisme kerja dalam organisasi yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi pegawai. Dengan demikian mekanisme bekerja berjalan semakin jelas sehingga rencana organisasi, tujuan organisasi, sumber daya organisasi dan struktur dasar organisasi dapat terdefiniskan bahkan dapat diimplementasikan secara tepat dan hal itu akan dapat mendorong pada efektifnya pencapaian tujuan maupun hasil kerja yang sesuai dengan rencana melalui upaya efektifitas pegawai, perlu adanya suatu

target dan sasaran yang terarah dengan melakukan suatu koordinasi sebab tanpa koordinasi dalam suatu organisasi akan mengalami suatu hambatan dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga tujuan organisasi tidak akan tercapai sebagaimana halnya yang telah ditentukan.

Efektivitas Program P2WKSS dalam hal ini adalah terwujudnya keluarga sehat dan sejahtera termasuk di dalamnya perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan kedudukan dan peran perempuan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan dalam rangka pengembangan masyarakat pedesaan. Dengan demikian keberhasilan program sangat ditentukan oleh pelaksana dalam melaksanakan program yang salah satunya ditentukan oleh pelaksanaan koordinasi antar kelompok kerja yang membidangi.

Pelaksana Program terpadu P2WKSS Kota Banjar dipilih sebagai kegiatan penelitian dengan leading sektor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar, Karena berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan bahwa bobot koordinasi pada pelaksanaan program tersebut cukup tinggi. Sehingga dipandang perlu untuk mengoptimalkan ketercapaian program kearah yang lebih baik. Dengan demikian sangatlah wajar apabila dinyatakan bahwa efektivitas pencapaian Program terpadu P2WKSS belum tercapai secara efektif terutama di Desa Mekarharja Kota Banjar dimana berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa desa tersebut dalam bidang kesehatan masih terdapat beberapa permasalahan dibandingkan dengan desa lain yang memperoleh program yang sama sehingga dengan demikian maka hal tersebut menjadi alasan mengapa desa Purwaharja dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini.

Selain hal tersebut, hasil pengamatan peneliti ditemukan beberapa permasalahan efektifitas pencapaian program terpadu Peningkatan Peran Serta Wanita Meninjau Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Bidang Kesehatan di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar tahun 2011 masih rendah dengan indikator:

- a. Keberhasilan kelompok kerja yang membidangi masalah kesehatan kurang sesuai dengan program yang telah ditetapkan
Contoh : kelompok kerja yang membidangi masalah kesehatan kurang tanggap terhadap tugas atau pekerjaannya sehingga permasalahan kesehatan yang terjadi tidak dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Masih adanya rumah yang tidak memiliki jamban serta tidak adanya pembuangan limbah sehingga hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan
- b. Kurangnya kepuasan masyarakat terhadap program yang telah dilaksanakan.
Contoh : kelompok kerja yang membidangi masalah kesehatan belum mampu memenuhi harapan masyarakat untuk memiliki sumber air sehingga masih terdapat masyarakat yang menggunakan air yang kurang higienis.
- c. Tingkat input dan output yang dicapai oleh kelompok kerja yang membidangi masalah kesehatan masih rendah.
Contohnya : Kelompok Kerja yang membidangi masalah kesehatan kurang mampu merubah perilaku masyarakat yang disebabkan kurangnya penyuluhan yang dilakukan secara rutin kepada masyarakat, sehingga masih ada ibu yang melahirkan ditangani oleh dukung beranak.

Berdasarkan indikator-indikator masalah tersebut di atas diduga, disebabkan oleh beberapa faktor dari pelaksanaan koordinasi belum berjalan secara optimal oleh pelaksana Program P2WKSS di Kota Banjar.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan lebih jauh pengaruh koordinasi terhadap efektifitas program. Dengan demikian penulis mengambil/mengangkat tema penelitian tesis ini dengan judul **Pengaruh Koordinasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terhadap Efektivitas Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) (Studi Pelaksanaan P2WKSS Bidang Kesehatan di Desa Mekarharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar).**

2.1 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menitik beratkan pada analisa mengenai teori organisasi dan efektifitas program dengan disertai beberapa teori pendukung yang memiliki hubungan maupun korelasinya dengan penelitian yang dilakukan. Koordinasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan efektifitas program dalam melaksanakan proses pekerjaan agar dapat mewujudkan tujuan dan hasil yang telah diharapkan.

Menggerakkan organisasi melalui koordinasi dan upaya perubahan organisasi yang dilakukan upaya kongkrit, salah satunya yaitu koordinasi sebagai upaya untuk meminimalisir tantangan dan hambatan organisasi, yaitu dilakukan koordinasi dan perubahan organisasi, ketika organisasi dipandang tidak efektif menjalankan fungsi organisasi sebagaimana mestinya.

Koordinasi merupakan proses peningkatan kegiatan khusus individu dan kelompok satu dengan yang lainnya dan menjamin tercapainya tujuan bersama. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Barnes dalam Kusriyanto, (2004 : 14) mengatakan bahwa :

Organisasi dirumuskan sebagai “suatu system yang secara sadar mengkoordinasikan kegiatan dari dua orang atau lebih”. Dengan perkataan lain organisasi mempunyai tujuan yang dinyatakan, system komunikasi dan proses koordinasi, serta sekelompok orang yang bersedia bekerja sama mengerjakan tugas yang perlu untuk mencapai tujuan.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

- a. Kesatuan Tindakan
- b. Komunikasi
- c. Pembagian Kerja
- d. Disiplin

Memandang organisasi sebagai sistem mempunyai beberapa kelebihan bagi pencapaian efektivitas. Pertama, ia memusatkan perhatian pada interaksi yang dinamis diantara berbagai bagian dari organisasi, ia melihat pada saling berhubungan. Kedua, suatu rancangan yang juga yang memusatkan perhatian pada interaksi dinamis antara organisasi dan lingkungan luarnya. Ketiga, dengan memusatkan perhatian pada tujuan dan sasaran, akan memungkinkan perbandingan pencapaian efektivitas dan efisiensi terhadap tujuan organisasi.

Berdasarkan konteks teori sistem, organisasi adalah suatu elemen dari sejumlah elemen yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Aliran masukan dan keluaran adalah dasar dari titik awal dalam menjelaskan organisasi dilihat dari teori system. Dengan istilah sederhana organisasi mengambil sumber daya (masukan) dari system yang lebih besar (lingkungan), memproses dari sumber daya dan mengubah dalam bentuk lain (keluaran).

Konsep organisasi sebagai suatu system yang berkaitan dengan system yang besar memfokuskan pentingnya umpan balik. Seperti yang telah dijelaskan organisasi tergantung pada lingkungan kerja tidak hanya masukan tetapi juga untuk penerimaan keluaran. Dengan istilah yang sederhana umpan balik ditujukan pula informasi yang tercermin hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi. Memahami maksimal besar diperoleh hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi.

Mengenai efektivitas program dalam suatu organisasi yang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dapat dikategorikan efektif. Keefektifan organisasi dapat diukur dari konsep efektivitas program kerja dalam pencapaian tujuan sebagai kriteria terakhir. Dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari segi pencapaian.

Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Steer dalam Jamin (1995:172) mengemukakan bahwa efektivitas program dapat dilihat dari tiga aspek utama. Ciri tersebut adalah Ketepatan Kualitas, Ketepatan Kuantitas dan Ketepatan Waktu. Dalam manajemen yang efektif meliputi pemahaman terhadap tiga aspek utama dari individu ini dan pengetahuan tentang hubungannya. Berkaitan dengan masalah efektivitas ini peneliti akan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Steer dalam Jamin tersebut.

Menurut Strees dan Jamin (1995:14) Terdapat cara pengukuran terhadap efektivitas yang secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut :

1. Kualitas, artinya bahwa hasil dari pada pekerjaan betul-betul berkualitas atau mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga organisasi akan melahirkan penghargaan dan kemajuan.
2. Kuantitas, artinya bahwa pengukuran ini didasari peraturan atau prosedur untuk menentukan beberapa nilai atau atribut dalam angka secara konsisten.
3. Dampak, artinya bahwa dampak disini adalah berhubungan dengan perubahan dengan adanya suatu kegiatan yang telah dilakukan karena suatu kegiatan akan memberikan dampak positif maupun negatif.
4. Ketepatan waktu, artinya bahwa ketepatan waktu disini terutama ditujukan kepada pemberi pelayanan yang diberikan oleh organisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu kesadaran tentang ketepatan waktu merupakan hal yang sungguh-sungguh penting untuk terus menerus ditanamkan dalam jiwa para anggota organisasi.

Efektivitas program disini berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditentukan. Artinya apakah penyelesaian suatu tugas itu diselesaikan, dan tidak untuk dijawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Berdasarkan teori dan konsep diatas maka saya berasumsi bahwa dengan berkoordinasi yang dilaksanakan dengan baik maka efektivitas program kerja akan meningkat dan pada gilirannya hasil kerja organisasi akan menjadi efektif. Penelitian ini akan diarahkan pada pengaruh koordinasi terhadap efektivitas program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kota Banjar.

Hubungan koordinasi dengan efektivitas dapat dikemukakan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang sangat erat bersifat mutualistik. Koordinasi merupakan variabel yang penting untuk mengemukakan efektivitas program di dalam organisasi. Dalam kaitannya hubungan antara Koordinasi dengan efektivitas program dapat diketahui melalui pengertian yang diuraikan oleh Sadler (1994 : 43), yaitu sebagai berikut :

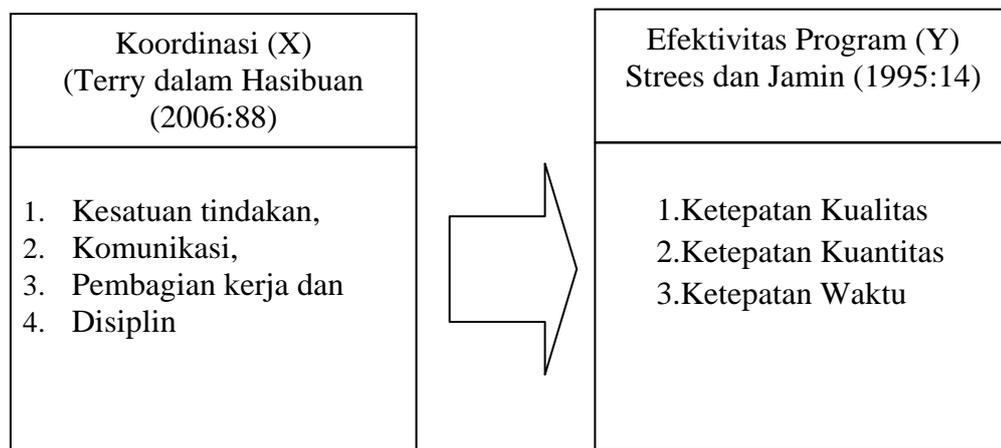
Koordinasi yaitu proses untuk dapat memastikan bahwa aktivitas perorangan atau kelompok yang saling berkaitan berjalan sedemikian rupa, sehingga mereka saling melengkapi satu dengan yang lainnya dan memberikan sumbangan yang maksimal pada pencapaian tujuan keseluruhan organisasi (efektivitas organisasi).

Koordinasi dalam organisasi bisa diwujudkan dengan beberapa cara, dan pilihan cara untuk mewujudkannya dan mengefektifkan organisasi dan memberikan implikasi pada desain organisasi. Sadler (1994 : 69) menyatakan bahwa koordinasi bisa diwujudkan dengan cara sebagai berikut :

1. Melalui manajemen lini
2. Melalui staf khusus
3. Pengelompokan aktivitas yang saling berhubungan
4. Dorongan kearah koordinasi spontan
5. Penggunaan struktur matrik

Pendapat Sadler (1994 : 69) dapat dipahami, bahwa efektivitas program sangat ditentukan oleh tingkat koordinasi seperti yang telah diuraikan diatas. Dengan demikian, tercapainya suatu sasaran dan tujuan efektivitas kerja didalam suatu organisasi (output dan outcome) yang optimal, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, dan terdapat dalam satu sistem. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa efektivitas program berarti penyelesaian pekerjaan yang tepat sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau diharapkan sebagaimana tujuan organisasi.

Untuk memperjelas acuan penelitian ini, maka dapat dibuat model paradigma pemikiran mengenai pengaruh Koordinasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terhadap Efektivitas Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kota Banjar. Maka berdasarkan teori dan pendapat yang telah diuraikan diatas maka dapat digambarkan paradigma pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1
Paradigma Pemikiran Penelitian

2.2 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah serta kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut : “Besarnya pengaruh koordinasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terhadap efektivitas program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sejahtera (P2WKSS) di Kota Banjar, ditentukan oleh dimensi Hirarki Manajerial, Aturan dan Prosedur, serta Rencana dan Penetapan tujuan”.

3.1 Objek Penelitian

Fokus pelitian ini diawali oleh rendahnya efektivitas program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar. Munculnya fenomena tersebut diduga kuat sebagai implikasi dari belum efektifnya koordinasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terhadap efektifitas

Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kota Banjar.

Oleh karena itu, fokus penelitian ini akan diarahkan pada pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dikaitkan dengan efektivitas program P2WKSS. Dengan demikian akan tercermin sejauhmana koordinasi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dapat memberikan pengaruh, baik secara parsial maupun simultan terhadap efektivitas program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kota Banjar.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peranan perempuan adalah melalui Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Program ini untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera termasuk di dalamnya perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan kedudukan dan peran perempuan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan dalam rangka pengembangan masyarakat pedesaan.

Untuk mengoptimalkan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) maka walikota Banjar membuat keputusan nomor 147.44/Kpts. 27 BKPSKBP/2009 tentang tim pembina program terpadu Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) .

Tim pembina program terpadu Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) memiliki kelompok kerja yang membidangi masalah pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat dan keberadaan lembaga kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta kesadaran berbangsa dan bernegara, pemerintahan desa.

3.2 Metode dan Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui prosedur, teknik dan metode penelitian yang umumnya berlaku pada penelitian social. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode *Survey explanatory*, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Menurut Arikunto (1998 : 388) bahwa “Untuk melakukan analisis data tersebut digunakan teknis statistik deskriptif yang berfungsi untuk mengelompokkan data, menggarap, menyimpulkan, memaparkan serta menyajikan hasil olahan”. Hal ini bertujuan untuk melakukan pola hubungan atau sebab akibat antara nilai suatu variable (*variable dependen*) jika nilai variable yang lain berhubungan dengan (*variable independen*). Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, yang dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis serta untuk melakukan interpretasi secara mendalam. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable X (Koordinasi I) sebagai variable bebas terhadap variable Y (Efektivitas Program) sebagai variable tergantung atau terikat.

3.2.1 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel Penelitian

Variable X adalah variabel koordinasi dimana dimensi variabel ini adalah kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin.

Variabel Y adalah variabel efektivitas program dimana dimensi variabel ini adalah ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas, dan ketepatan waktu. Operasional variabel penelitian tersebut dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian

NO.	VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR
1.	Koordinasi (X)	Kesatuan Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesadaran setiap anggota untuk mencapai tujuan organisasi 2. Adanya pengaturan pimpinan terhadap kegiatan anggota organisasi 3. Adanya pengaturan waktu dalam setiap kegiatan 4. Dapat mengambil keputusan dengan cepat dalam pelaksanaan pengkoordinasikan bawahan
		Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pemberian petunjuk pelaksanaan kerja dengan jelas 2. Adanya arahan tujuan organisasi pada bawahan 3. Adanya anjuran untuk bekerjasama 4. Adanya rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin dengan anggota organisasi
		Pembagian Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pembagian kerja berdasarkan fungsi 2. Adanya pembagian kerja berdasarkan tim yang dibentuk 3. Adanya pembagian kerja berdasarkan waktu 4. Adanya pembagian kerja berdasarkan waktu
		Disiplin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina kedisiplinan secara pribadi 2. Membina kedisiplinan yang bersifat membangun 3. Membina perilaku anggota organisasi 4. Meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan kegiatan

NO.	VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR
2.	Efektivitas Program (Y)	Kualitas,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan bidang kesehatan dapat memenuhi syarat dalam hal keramahan. 2. Pelayanan bidang kesehatan sudah memenuhi syarat dalam hal meresponsifan. 3. Pelayanan bidang kesehatan sudah memenuhi syarat dalam hal sikap empati
		Kuantitas,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan posyandu dapat dilaksanakan secara rutin 2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan lingkungan 3. Bertambahnya sarana dan prasarana kesehatan
		Dampak,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan kesehatan 2. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan posyandu 3. Meningkatnya tingkat kesehatan ibu dan bayi
		Ketepatan waktu,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya jadwal penyuluhan kesehatan secara jelas 2. Adanya kegiatan Penyuluhan Keluarga Bahagia Sejahtera 3. Mengadakan Pembinaan Kegiatan dalam hal pendapatan Keluarga secara rutin

3.2.2 Populasi Penelitian

Populasi menurut Sugiyono (2001:57) adalah sebagai berikut: "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek, yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Jumlah penduduk desa Mekarharja sejumlah 895 orang data tahun 2012(data kependudukan). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti program Program P2WKSS di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dengan jumlah populasi sebanyak 459 orang.

Menurut Arikunto (1998:117), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sampel adalah "Sebagian atau wakil populasi yang diteliti" sedangkan menurut

Sugiyono (2002:73), yang dimaksud dengan sampel adalah “Bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu”.

Karena jumlah populasi telah diketahui, yakni masyarakat yang mengikuti Program P2WKSS di Desa Mekarharja Kecamatan Purwahaarja Kota Banjar yaitu sebanyak 459 orang. Maka untuk menentukan besarnya ukuran sampel dipakai rumus Slovin (Umar, 2000: 108) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana : n = Jumlah sampel
N = Jumlah Populasi
e = Persen kelonggaran ketelitian (10%)

Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh sampel sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{459}{1 + 459(0.1)^2}$$

$$n = \frac{459}{1 + 459(0.01)}$$

$$n = \frac{459}{1 + 4.59}$$

n = 82,11 atau dibulatkan menjadi 82 orang.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat ditentukan jumlah sample yang dijadikan responden adalah 82 orang masyarakat yang mengikuti Program P2WKSS di Desa Mekarharja Kecamatan Purwahaarja Kota Banjar

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku dan catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti maupun hanya sebagai penunjang.
- b. Penelitian lapangan yaitu mengadakan pengamatan langsung untuk mendapatkan data melalui :
 1. Observasi non partisipan, yaitu penelitian mengamati obyek yang sedang diteliti guna memperoleh gambaran yang tetap mengenai masalah dan hambatan yang dihadapi serta upaya perbaikan yang diperlukan tanpa penelitian ikut serta dalam pelaksanaan pekerjaan.
 2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab langsung dengan Tim Pelaksana Program P2WKSS Kota Banjar atau pejabat yang dianggap berkopeten dengan masalah penelitian.

3. Angket, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebutkan daftar pertanyaan secara tertulis yang bersifat tertutup, artinya telah disediakan alternatif jawaban.

Kategori jawaban dan kriteri pembobotan jawaban responden terhadap angket sebagai berikut :

Tabel 3.3
Kategori dan Kriteria Pembobotan Jawaban Angket

NO	BOBOT NILAI	NILAI POSITIF	NILAI NEGATIF
1	Sangat Setuju (SS)	5	1
2	Setuju (S)	4	2
3	Netral (N)	3	3
4	Tidak Setuju (TS)	2	4
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

Sumber : Sugiyono, 1997

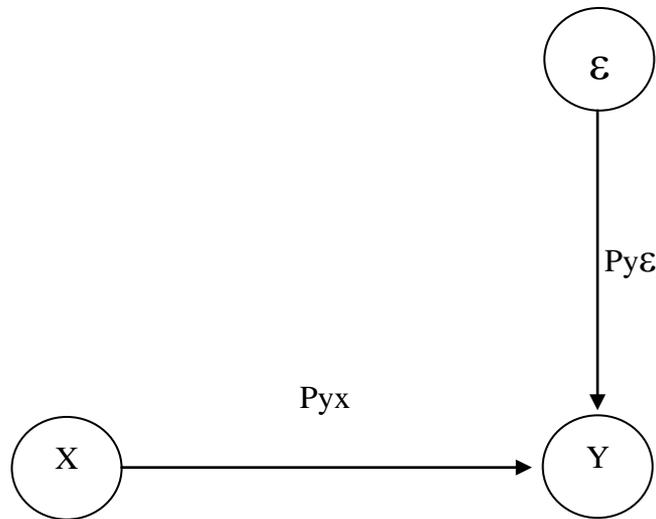
Skor yang dihasilkan oleh pernyataan-pernyataan ini tingkat pengukurannya ordinal. Alat ukur variabel harus diuji validasi dan reliabilitasnya melalui uji *internal consistency*. Item (pertanyaan) yang ada dicoba kekelompok responden, kemudian dilakukan item analisis. Selanjutnya item yang tidak memenuhi reliabilitas perlu diganti.

Pengujian validitas reliabilitas terhadap angket penting dilakukan mengingat bahwa alat ukur yang dibuat diharapkan benar-benar merupakan alat untuk mengukur variabel yang diteliti dan akhirnya mendapatkan hasil yang memuaskan.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Analisis dalam pengolahan data melalui Analisis Jalur (*Path Analysis*) yaitu dengan melihat besarnya pengaruh dari variabel koordinasi terhadap efektivitas Program P2WKSS di Kota Bnajar.

Untuk itu alur penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2
Desain Variabel Penelitian

Dimana :

X = Variabel bebas (Koordinasi)

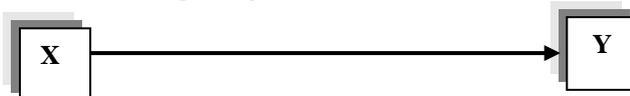
Y = Variabel tergantung/terikat (Efektifitas Program)

ε = Variabel Residu

Berdasarkan gambar tersebut, data yang terkumpul akan dianalisa secara statistik, baik secara deskriptif inferensial, maupun analisis hubungan antar variabel. Analisis hubungan antar variabel dilakukan dengan menggunakan analisis statistik dengan model analisis jalur (*path analysis*).

Adapun langkah-langkah analisis jalur sebagai berikut :

1. Membuat diagram jalur variabel



2. Menghitung korelasi antara variabel independen (X) dengan variabel dependen Y.

3. Menyusun matrik Korelasi RX dan Vektor RY

$$RX \begin{bmatrix} r_{X_1X_2} & r_{X_1X_2} \\ r_{X_1X_2} & r_{X_1X_2} \end{bmatrix} RY \begin{bmatrix} r_{YX_1} \\ r_{YX_2} \end{bmatrix}$$

4. Menghitung invers matrik RX yaitu RX^{-1}

$$RX^{-1} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix}$$

5. Menghitung koefisien jalur PYX, yaitu :

$$PYX = RX^{-1} RY : 1 = 12$$

6. Koefisien determinan $R^2Y (X_1X_2)$

$$R^2Y(X_1X_2) = \sum_{i=1}^K P_{YX_1} R_{YX_2}$$

9. Menentukan keputusan

- Jika t hitung $> t_{(\alpha, n-k-1)}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat perbedaan tentang besarnya pengaruh diantara dua variabel.
- Jika t hitung $< t_{(\alpha, n-k-1)}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya besarnya pengaruh diantara dua variabel adalah sama.

3.2.4.1 Uji Instrumen Penelitian

Sebelum angket digunakan untuk mengumpulkan data maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian. Analisis instrument penelitian dilakukan untuk melihat kelayakan dari kuesioner penelitian yang digunakan. Analisis ini ditempuh dengan cara melakukan analisis validitas (ketepatan) dan reliabilitas (keandalan) yang masing-masing analisisnya dilakukan sebagai berikut:

(1) Uji Validitas

Sebuah alat ukur yang tinggi validitasnya akan memiliki eror pengukuran yang kecil, artinya skor setiap obyek yang diperoleh oleh alat ukur tersebut tidak jauh berbeda dari skor yang sesungguhnya. Dengan demikian secara keseluruhan alat tes yang bersangkutan akan menghasilkan *varian eror* yang kecil pula. Ukuran validitas ditentukan oleh tingkat hubungan atau tingkat keeratan (korelasi) antara item-item yang ada dengan jumlah skornya dengan menggunakan rumus Pearson Product Moment, (Arikunto, 2006 : 170) sebagai berikut :

$$xy = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{N \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

xy = Koefisien korelasi pearson antara item dengan variabel yang bersangkutan

X = Skor item dalam variabel

Y = Skor semua item dalam variabel tersebut

N = Jumlah responden

Tujuan dari uji validitas angket adalah melihat sejauhmana keterkaitan antara variabel-variabel manifest (indikator) yang menerangkan atau membentuk variabel-variabel laten yang sesuai dengan penelitian, merupakan variabel laten yang terbentuk.

(2) Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui alat ukur yang digunakan. Keandalan ini menunjukkan dan homogenitas angket digunakan sebagai alat ukur metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas (keandalan) alat ukur penelitian ini digunakan *interval consistency* dengan teknik belah dua (*Split*) dari Spearman-Brown (Sugiyono 1999 : 19) dengan model matematisnya adalah sebagai berikut :

$$r1 = \frac{2 \cdot rb}{1 + rb}$$

Keterangan :

r1 = Reliabilitas

r2 = Korelasi antara belahan ganjil dan belahan genap

Adapun langkah-langkah pengolahan data yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Data dari kedua variabel yang diukur menggunakan instrument pengukuran dengan menggunakan skala likert's yang menghasilkan skala pengukuran ordinal, diubah terlebih dahulu dengan menggunakan Metode Succesive Interval sehingga diperoleh data dengan skala pengukuran interval.
2. Setelah didapat data dengan skala pengukuran interval kemudian dicari koefisien korelasi dengan *Pearson Product Moment*.
3. Kemudian dibuat sebuah matriks korelasi dan *matriks invers*.

Setelah diperoleh matriks invers, kemudian dicari koefisien dengan menggunakan rumus :

$$Pyx = \frac{-(CRyx)}{CRyy}$$

Keterangan :

Pyx = Merupakan koefisien jalur dari variabel X terhadap variabel Y

CRyx1 = Unsur atau elemen pada basis Y dan kolom X dari matriks invers.

CRyy = Unsur atau elemen pada baris X dan kolom Y dari matriks invers.

Untuk menghitung pengaruh-pengaruh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model, digunakan rumus :

$$P^2_{y\epsilon} = 1 - R^2_{yx1 \dots x1}$$

1. Dilakukan pengujian secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap koefisien-koefisien terhadap jalur yang diperoleh. Hipotesis pada pengujian secara keseluruhan atau bersama-sama tersebut adalah :

$$Ho : Pyxi = Pyxk = 0$$

$$H1 : Sekurang-kurangnya ada sebuah Pyxi = 0$$

$$\text{Statistik Uji yang digunakan adalah } F = \frac{(n-k-1)R^2}{k(1-R^2)}$$

Statistik uji tersebut mengikuti distribusi F - *Snedecor* dengan derajat bebas V1 = k dan V2 = n-k-1 kriteria pengujian oleh Ho Jika F dihitung < F table.

2. Apabila hasil pengujian secara keseluruhan Ho ditolak, artinya sekurang-kurangnya ada satu Pyxi = 0, untuk mengetahui Pyxi mana yang = 0 dilakukan pengujian secara individu, dengan hipotesisi sebagai berikut :

$$t1 = \frac{Pyx1}{\sqrt{\frac{(1-R^2)(Rii)}{n-k-1}}} = 1, 2, \dots K$$

Statistic uji tersebut mengikuti distribusi t Student dengan derajat bebas n - k - 1 kriteria pengujian tolak Ho jika t hitung > t tabel.

4.1 Pembahasan Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis melakukan pembahasan sebagai berikut

1. Pengaruh pelaksanaan koordinasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terhadap efektifitas program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kota Banjar

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif pelaksanaan koordinasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terhadap efektifitas program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kota Banjar sebesar 46.10 % artinya pelaksanaan koordinasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dampak terhadap efektifitas program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kota Banjar apabila pelaksana melaksanakan koordinasi dengan baik.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar yang menyatakan bahwa kepala telah berupaya melakukan koordinasi dengan pegawai sehingga diharapkan pegawai memahami tugas dan fungsinya dalam melaksanakan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat Hasibuan (2006 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah “Suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Selanjutnya menurut Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni:

- a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
- b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi .
- c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
- d. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
- e. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan

Dengan demikian maka pelaksanaan koordinasi yang dilakukan dalam melaksanakan suatu program sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan mengingat melalui koordinasi

yang baik maka setiap permasalahan dapat dipecahkan secara bersama-sama sehingga efektivitas kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam menciptakan efektivitas kerja pegawai maka kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar telah berupaya mengatasi setiap konflik di dalam organisasi sehingga pegawai memiliki ketenangan dan kenyamanan dalam melaksanakan program yang ditetapkan.

Uraian tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar yang menyatakan bahwa untuk menciptakan situasi yang kondusif di dalam organisasi maka peran pimpinan sangat penting dalam menjaga kondisi yang nyaman dan aman bagi pegawai dalam bekerja sehingga diharapkan pegawai mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Selain kemampuan mengatasi konflik maka untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai maka dilakukan upaya pembagian kerja dalam organisasi sehingga pegawai dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya dan tidak terbebani dengan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan.

Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Supriyono (2000:29) mendefinisikan pengertian efektivitas, sebagai berikut:

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut

Uraian tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar diketahui bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas kerja pegawai maka telah dilakukan pembagian kerja dengan cara membuat kelompok kerja yang diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian pekerjaan.

Keberhasilan suatu aktifitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan target, sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dan apabila tujuan dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dikatakan efektif dan sebaliknya apabila tujuan dan target tidak dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya maka aktifitas itu dikatakan tidak efektif. Menurut Strees dan Jamin (1995:14) Terdapat cara pengukuran terhadap efektivitas yang secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut :

1. Kualitas, artinya bahwa hasil dari pada pekerjaan betul-betul berkualitas atau mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga organisasi akan melahirkan penghargaan dan kemajuan.
2. Kuantitas, artinya bahwa pengukuran ini didasari peraturan atau prosedur untuk menentukan beberapa nilai atau atribut dalam angka

secara konsisten.

3. Dampak, artinya bahwa dampak disini adalah berhubungan dengan perubahan dengan adanya suatu kegiatan yang telah dilakukan karena suatu kegiatan akan memberikan dampak positif maupun negatif.
4. Ketepatan waktu, artinya bahwa ketepatan waktu disini terutama ditujukan kepada pemberi pelayanan yang diberikan oleh organisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu kesadaran tentang ketepatan waktu merupakan hal yang sungguh-sungguh penting untuk terus menerus ditanamkan dalam jiwa para anggota organisasi.

Pada hakekatnya para anggota atau pegawai dalam suatu organisasi adalah merupakan faktor pengaruh yang paling penting atas efektivitas, karena perilaku anggota organisasi itu dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Kesadaran akan sifat perbedaan pribadi yang terdapat diantara para pegawai sangat penting artinya karena para pegawai berbeda memberikan tanggapan dengan cara yang berbeda pula atas usaha-usaha manajemen untuk mencapai usaha yang diarahkan pada tujuan. Dengan mengetahui perbedaan ini, maka efektivitas akan dapat diukur melalui suatu system yang bekerja secara stimulant dan sinergi.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa koordinasi baik secara teoritik maupun empirik telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai di Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh koordinasi terhadap efektivitas Program P2WKSS di Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi telah dilaksanakan cukup baik dengan pegawai sehingga pegawai memahami tugas dan fungsinya dalam melaksanakan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar walaupun masih terdapat beberapa indikator yang masih harus ditingkatkan pelaksanaannya.
2. Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kota Banjar telah tercapai cukup efektif mengingat dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan pembagian kerja dengan cara membuat kelompok kerja yang diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian pekerjaan.
3. Terdapat pengaruh yang positif pelaksanaan koordinasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terhadap efektifitas program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kota Banjar artinya pelaksanaan koordinasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan memberikan dampak terhadap efektifitas program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kota Banjar apabila pelaksana melaksanakan koordinasi dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebaiknya dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa dimensi seperti memperhatikan kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin sehingga dengan diterapkan keempat dimensi tersebut maka koordinasi dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Efektivitas program yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebaiknya memperhatikan dimensi kualitas, kuantitas, dampak serta ketepatan waktu sehingga tujuan dari program P2WKSS dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Sebaiknya pemerintah Kota Banjar tetap melaksanakan program P2WKSS hal ini dikarenakan berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa dengan adanya program tersebut dapat berdampak pada meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- A.A. Anwar Prabu *Mangkunegara*. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- A.S. Moenir 2007. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bumi. Aksara
- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta. Al-Braha
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Bina Aksara.
- _____ 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bambang Kusriyanto. 2004. *Meningkatkan Produktivitas Karyawan*. Jakarta: PT. Pustaka. Binaman Pressindo
- Barnes, M.C, A.H. Fogg C.N and L.G. Titman 1984. *Organisasi Perusahaan Teori dan Praktek*. Alih bahasa Bambang Kusriyanto. Jakarta : Pustaka Binaman.
- Basri, A. F. M., & Rivai, V. 2005. *Performance appraisal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- D. Riant Nugroho. 2004. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Dalton dan Smith. 2006 *Komunikasi Politik dan Analisa Kebijakan Publik*.Hasta Mitra, Jakarta.
- Dunn, N Wiliam, 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Jogjakarta : Gajah Mada Press.
- Edi Suharto, 2008, *Kebijakan Sosial sebagai kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Gie, The Liang. 1982. *Ensiklopedi Adminstrasi*. Jakarta : Gunung Agung.

- Handayani, Soewarno, 2002, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Haji Masagung
- _____1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta Gunung Agung.
- Handoko. T. Hani. 1997. *Manajemen*. Edisi Kedua Yogyakarta : BPFE
- _____2003. *Manajemen*. Edisi Kedua Yogyakarta : BPFE
- Harold Koonz. 1984. *Manajemen*, Singapura : Mc Craw Hill Book Company, Alih Bahasa Moh. Ma'ud. 1988. Jakarta Erlangga.
- Hogwood and Gunn. 2003, *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Balai Pustaka
- Husein, Umar, 2000. *Metodologi Penelitian, Aplikasi dalam Pemasaran*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hutahuruk 2006. *Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Format Masa Depan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____ 2000. *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Koonz, Harold. Cyril O'Donell. Hein Wehrich , 1996.*Manajemen*. Alih Bahasa Gunawan Hutauruk, Jilid I, Jakarta : Erlangga.
- Koonz, Harold. Cyril O'Donell. Hein Wehrich. 1984. *Manajemen*. Alih Bahasa Alfonsus Sirait. Edisi Kedelapan, Jakarta : Erlangga.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1996. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid I*. Jakarta : Gunung Agung.
- Magdalena Jamin, 1995 *Efektifitas Organisasi*, Seri Manajemen No. 47, Erlangga, LPPM, Jakarta
- Magill. 1999. *Analisis Kebijakan Publik: (Edisi Revisi)*, Penulis: Edi Suharto, Alenia Press.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

- Malayu S.P, Hasibuan. 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Marshall. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. (Edisi Revisi), Jakarta : LP3ES.
- Moekijat, 1994. *Koordinasi*. Bandung : Mandar Maju.
- _____1996. *Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja*, Bandung : PT. Pionir Jaya.
- Moerhead, Gregory and Ricky W. Griffin 1995. *Organizational Behavior (Managing people and organization)*. Boston, Toronto : Houghton Mifflin Company.
- Nasution. Mulia, 1996. *Pengantar Manajemen (Dengan Contoh Rencana Penjualan Perusahaan)*. Jakarta : Djambatan.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- R.A. Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Satu,. Yogyakarta : BPFE
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sadler Philip. 1994. *Mendesain Organisasi. Terjemahan Fauzi Bustami*. Jakarta : Pustaka Binaan Pressindon.
- Siagian, Sondang. P. 1997. *Manajemen Kepegawaian*. Jakarta : Erlangga Edisi Keempat
- _____1986. *Peranan Staf dalam Manajemen*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- Steer, Richard M. 1995. *Efektivitas Organisasi. Terjemahan Magdalena Jamin*. Jakarta : Erlangga.
- _____1992. *Manajemen*. Alih Bahasa, Alexander Sindoro, Penyuting Bambang Sayaka. Jakarta : PT Prenhalindo.
- Suganda, Dann. 1991, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta : PT. Intermedia
- _____1996, *Manajemen Administrasi Suatu Pendekatan Sistem dalam Manajemen Perkantoran*. Bandung : Sinar Baru.

- Sugiyono. 1997. *Metode Penelitian Administarasi*. Bandung : Alfa Beta
- _____. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Suradinata, Ermaya. 1995. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Kondisi Era Globalisasi*. Bandung : Ramadhan.
- Sutisnawidjaja, Tjahjo, 1990. *Riset dan Praktek Penelitian Administrasi*, Edisi Kedua : Lemlit Unpas Press.
- Tangkilisan. 2003. *Kebijakan*. Jakarta:Media Pesada
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Westra. 1989. *Enseklpedi Administrasi*. Jakarta : CV. Haji Masa Agung.
- Zahnd, Markus. 2006. *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius

Dokumen-Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota
- Petunjuk Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Tahun 2009.
- Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor 147.44/Kpts.27-BKPSKBPP/2009, Tentang Tim Pembina Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2009 Pada Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Sebagai Lokasi Kelurahan Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kota Banjar Tahun 2009.